

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga.
- Cefrida, Mentari. 2014. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota pekabaru. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Fatmala, Juanita, 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pada SKPD Kabupaten Bengkulu tengah). Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dkk. 2014. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik (Edisi). Yogyakarta: Andi.
- Muindro, Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurul, Qamar. 2010. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan *Civil Law System* dan *Common Law System*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Oktiandra S, 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kota Dumai.
- Riantiarno dan Azlina, 2011. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Riau.
- Sumiati, 2012. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD), AKuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi.
- Susanto, Azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

Zulharman, Khodri, 2015. pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Skripsi. Universitas Riau.

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN). 2011. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<http://www.Rohil.go.id>

<http://www.riaupotenza.com>